

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan SKPD wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing SKPD.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Sintang, **Maret 2022**
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG
DINAS
PERHUBUNGAN

M. ORIENSUS KAHA, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641125 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang ...	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Sintang	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sintang	2
4. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kab. Sintang ...	3
5. Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Sintang ..	7
B. Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	9
1. Visi	9
2. Misi	10
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja	10
Utama	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (LAKIP) Tahun 2012=3 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dins Perhubungan Kabupaten Sintang selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2013 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang perhubungan. Keberhasilan di bidang perhubungan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Perhubungan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan utama pembangunan transportasi.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Perhubungan juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Perhubungan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

1. Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan SKPD wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing SKPD.

Laporan Kinerja Tahunan adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yang bermanfaat untuk menciptakan *good governance*, instansi pemerintah yang akuntabel serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah sehingga dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan. Sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan terbentuk mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Adapun struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbag Aparatur dan Umum
3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Angkutan Jalan; dan
 - c. Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
4. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - c. Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga
5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Kendaraan, Perbengkelan dan Perparkiran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan. Transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi

berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Fungsi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokoknya meliputi:

- a. perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
- c. pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Perhubungan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perhubungan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perhubungan;
- f. pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Perhubungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
- h. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;
- i. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
- j. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sampai dengan 31 Desember 2021 memilik 47 orang Pegawai Negeri Sipil dan 23 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

NO.	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	Juru Muda Tk. I/I/b	1
2	Pengatur Muda Tk.I/II/b	3
7	Pengatur/II/c	7
8	Pengatur Tk. I/II/d	7
9	Penata Muda/III/a	5
10	Penata Muda Tk.I/III/b	6
11	Penata/III/c	3
12	Penata Tk.I/III/d	10
13	Pembina/IV/a	2
14	Pembina Tk.I/IV/b	-
15	Pembina Utama Muda/IV/c	1
16	Pembina Utama Madya/IV/d	-

Tabel 1.2 Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Berdasarkan pendidikan terakhir

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	SD	1
2	SLTP	-
3	SMA	19
4	D3	6
5	Starata 1	15
6	Starata 2	4

Tabel 1.3 Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Berdasarkan Diklatpim Yang Diikuti

NO.	NAMA	JABATAN	DIKLATPIM YANG SUDAH DIIKUTI		
			TINGKAT IV	TINGKAT III	TINGKAT II
1.	Florensius Kaha, S.Pd.M.Si	Kepala Dinas	√	√	√
2.	Marwan, SE, M.Si	Kabid Sarana dan Prasarana	√	√	-
3.	Barrie Danu Brata, SE, M.A.P	Kabid Perhubungan Sungai Danau dan Penyeberangan	√	-	-
4.	Rizal Novendry, A.Md LLAJ	Kabid Perhubungan Darat	√	-	-
5.	Agustinus, S.Sos	Kasi Penganalisaan dan Operasional Terminal	-	-	-
6.	Abibon Yub, A.Ma. PKB	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
7.	Catur Joko Susanto, S.E.	Kasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-

NO.	NAMA	JABATAN	DIKLATPIM YANG SUDAH DIKUTI		
			TINGKAT IV	TINGKAT III	TINGKAT II
8.	Alimsyah, S.Sos	Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-
9.	Sri Purawati, SE	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	-	-	-
10.	Fransiskus Edward, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Aparatur dan Umum	-	-	-
11.	Jhon Liston Hutahaean, S.IP	Kasi Kendaraan, Perbengkelan dan Perparkiran	√	-	-
12.	Rusmin Esmardi	Kasi Penganalisaan dan Operasional Dermaga	√	-	-
13.	Edy Paryanto, S.Sos	Kasi Lalu Lintas Jalan	-	-	-
14.	Riduansyah, S.Sos	Kasi Angkutan Jalan	-	-	-
15.	Gunawan	Kasi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-	-

Tabel 1.4 Data Pegawai/Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2020

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS
1.	Tommy Kurniadi, SE	S1	Tenaga Teknis Lapangan pada seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
2.	Nurmaya, SE	S1	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
3.	Maria Elsy Oktari, S.Pd	SI	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
4.	Henny Hiasinta, SH	S1	Teknis Administrasi Perkantoran pada seksi kendaraan, perbengkelan dan perparkiran
5.	Lies Pradipta Apriyani Seknun, S.Tr.Tra	S1	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
6.	Reny Puspita, S.A.P	SI	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Subbag Aparatur dan Umum
7.	Hildan Sodikin	SMA	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS
8.	Eko Priyatno	SMA	Tenaga Teknis lapangan Terminal Tj. Puri pada seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
9.	Mirjanudin	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Lalu Lintas jalan
10.	Sudiono	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
11.	Yulianus	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program & Perlengkapan
12.	Muhammad Nisfu Desmana Putra	SMA	Tenaga administrasi Perkantoran pada Seksi Kendaraan, perbengkelan dan perparkiran
13.	Hardiyus	SMA	Tenaga Supir pada Subbag Aparatur dan Umum
14.	Risma Amanda Laraszati	SMA	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga
15.	Gema Henny Triana	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Lalu Lintas Jalan
16.	Yasri Hermawan	SMA	Tenaga Teknis Lapangan Terminal Sungai Durian pada seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
17.	Watakwa Karsawan	SMA	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan
18.	Ilyasa	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Sei Durian pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
19.	Lubertus Asus Juniardi	SMP	Tenaga Kebersihan dan jaga malam pada Sub Aparatur dan Umum
20.	Lilis Setia Rini	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Sungai Durian pada seksi Penganalisaan dan Operasional terminal

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS
21.	Fetrus	SMP	Tenaga Kebersihan Gedung Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
22.	Endah Sriwinarti	SMP	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Subbag Aparatur dan Umum
23.	Tri Handoko	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Tj. Puri pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal

5. Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan bersumber dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 7.090.568.585 yang terdiri atas belanja Operasi sebesar Rp. 5.948.853.585 dan belanja Modal sebesar Rp. 1.141.715.000.

6. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Hingga 31 Desember 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memiliki aset sebesar Rp. 62.736.721.931,92 yang diantaranya berupa aset tetap yaitu tanah sebesar Rp. 2.047.107.895,78, peralatan dan mesin Rp. 9.568.233.630,68, gedung dan bangunan Rp. 66.418.983.213,65 jalan irigasi dan jaringan 16.443.530.222,57 aset tetap lainnya 249.816.250,00, dan konstruksi dalam pengerjaan Rp. 101.916.000,00.

B. Permasalahan Utama

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan, transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan penyediaan sarana transportasi angkutan sudah barang tentu dapat mewujudkan transportasi yang lancar, tertib, aman dan nyaman dengan memberikan pelayanan prima kepada (publik), serta dapat menjangkau daerah pedalaman, guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu:

- a. Terbatasnya fasilitas transportasi menghambat arus orang dan barang sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menurun.
- b. Ketersediaan moda transportasi yang dapat menjangkau daerah pedalaman menghambat perputaran uang, barang dan informasi.
- c. Keterbatasan anggaran di tahun 2021 akibat dari refocusing anggaran .
- d. Belum tersedianya tenaga PPNS.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Laporan Kinerja Tahunan yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui Rencana Strategis 2016-2021 menunjukkan komitmen melalui visi, misi, tujuan, strategi dan faktor pendukung lainnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda program yang dicanangkan bersama sebagai komitmen seluruh jajaran. Fungsi Rencana Strategis adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan pelayanan dibidang perhubungan.

1. Visi

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk itu suatu visi harus menekankan pada tujuan kriteria kinerja, perilaku, aturan, standar dan keputusan yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik dan menjadi keputusan para pemegang kepentingan namun harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi. Perumusan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai wujud daripada keinginan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas pokok yang diberikan kepadanya.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah :

“ Terwujudnya Transportasi Yang Handal dan Berdaya Saing “

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah. Berdaya saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang profesional.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, untuk dapat menjembatani kondisi saat ini menuju harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu.

Upaya dalam mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur yang berkualitas , tepat guna , dapat melayani seluruh wilayah dan mencakupi kebutuhan masyarakat
- b. Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
- c. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Dinas Perhubungan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mencapai misi 1 ditetapkan tujuan yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi .
- b. Dalam rangka mencapai misi 2 ditetapkan tujuan yaitu Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi
- c. Dalam rangka mencapai misi 3 ditetapkan tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM

Sasaran Strategis

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran pembangunan transportasi tahun 2020 sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 adalah:

- a. Mencapai tujuan “meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi” ditetapkan sasaran yaitu: Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang
- b. Mencapai tujuan “menurunnya jumlah kecelakaan transportasi” ditetapkan sasaran yaitu:
 1. Tersedianya Fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas
 2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang
- c. Mencapai tujuan “meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM” ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan tersedianya SDM yang handal dan profesional untuk memberikan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2021 maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas.
- b. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai
- c. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor: 060/17/TAHUN 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, tanggal 2 Desember 2020.

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang Handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1) Jumlah Arus Penumpang angkutan umum darat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		2) Jumlah arus penumpang angkutan Umum sungai dan danau	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		3) Jumlah Armada kapal angkutan umum sungai dan danau	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		4) Jumlah Angkutan Umum Darat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang

1	2	3	4	5	6
		5) Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis 3. Pelabuhan Sungai 4. Pelabuhan Udara 5. Terminal Bis	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
2.	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Rambu-rambu lalu lintas	1) Rasio Pemasangan rambu-rambu	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
3	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1) Jumlah izin Trayek Angkutan darat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		2) Jumlah izin Trayek Angkutan Umum Sungai dan Danau yang beroperasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		3) Jumlah Uji KIR angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		4) Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan dokumen turunan dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan melalui proses penganggaran yang berisi janji Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah dirancang untuk periode 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menetapkan Penetapan Kinerja (PK) atau yang sekarang disebut Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan Orang dan barang	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Darat 2. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Sungai dan Danau 3. Jumlah Armada kapal angkutan umum sungai dan danau 4. Jumlah angkutan umum darat 5. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1. Pelabuhan 2. Pelabuhan Udara 3. Terminal Bis	593.456 Orang 323.280 Orang 199 Kapal 370 Unit 3 Unit 2 Unit 5 Unit
2.	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan rambu-rambu lalu lintas	1. Rasio Pemasangan rambu-rambu	95%
3.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1. Jumlah izin trayek angkutan darat 2. Jumlah izin trayek angkutan umum sungai dan Danau yang beroperasi 3. Jumlah Uji KIR angkutan Umum 2. Kepemilikan KIR Angkutan Umum	75 Trayek 20 Trayek 104 Unit 43 %

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.532.346.035,00	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.742.000,00	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	12.742.000,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.332.757.798,00	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.321.209.398,00	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.806.800,00	APBD
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.741.600,00	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	44.910.000,00	
	- Pembinaan , Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	44.910.000,00	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	43.792.755,00	
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.792.755,00	APBD
5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.356.500,00	
	- Pendataan dan Pengolahan Adminsitarsi Kepegawaian	34.356.500,00	APBD
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.403.882,00	
	- Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.993.000,00	APBD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48.494.700,00	APBD
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	7.265.500,00	APBD
	- Penyediaan bahan logistik kantor	49.896.188,00	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.715.494,00	APBD
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.440.000,00	APBD
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	139.599.000,00	APBD

7.	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya	62.570.000,00 21.230.000,00 41.340.000,00	ABPD APBD
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	631.181.600,00 2.690.000,00 175.101.600,00 453.390.000,00	APBD APBD APBD
9.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	77.631.500,00 11.447.000,00 44.074.500,00 8.052.000,00 14.058.000,00	APBD APBD APBD APBD
B.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	377.725.000,00	
1.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	30.000.000,00 30.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Pembangunan Gedung Terminal	200.000.000,00 200.000.000,00	APBD
3.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	87.725.000,00 87.725.000,00	APBD

4.	<i>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan</i> - Pelaksanaan inspeksi , Audit dan pemantauan pemenuhn persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten?kota - Pelaksanaan inspeksi , Audit dan pemenuhan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	<i>40.000.000,00</i> 30.000.000,00 10.000.000,00	APBD APBD
5.	<i>Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</i> - Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum utk jasa agkutan orang dan/atau barang antar kota dala 1 (satu) Kabupaten/Kota	<i>20.000.000,00</i> 20.000.000,00	APBD
C.	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	<i>1.7720.699.000,00</i>	
1.	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau Badan Usaha</i> ❖ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	<i>35.000.000,00</i> 15.860.000,00 19.140.000,00	APBD APBD
2.	<i>Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota</i> - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam satu daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	<i>15.735.000,00</i> 15.735.000,00	APBD APBD

3.	Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kab/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kab/Kota ❖ Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kab/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kab/Kota dalam daerah Kab/Kota.	20.000.000,00 20.000.000,00	APBD
4.	Kegiatan Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal ❖ Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	629.964.000,00 629.964.000,00	APBN
D.	Kegiatan Pengembangan sumber daya	204.650.000,00	
1.	Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional - Pelaksanaan Kerjasama antar lembaga	204.650.000,00 204.650.000,00	APBD
Total		7.630.770.035,00	

Sintang, Pebruari 2021

Pihak Kedua,
BURATI SINTANG



dr. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG**



**FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196411251 198803 1 004**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi dapat tercermin dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja dimaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah atau solusi yang akan diambil suatu instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun dimaksud.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis dengan cara menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis

beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya serta hasil pengukuran kinerja kegiatan serta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya.

Cara melakukan analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
- b. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja serta solusi atau langkah yang telah dilakukan. Sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ditetapkan 4 (empat) sasaran, dari keempat sasaran dimaksud 1 (satu) sasaran merupakan yang bersifat pelayanan Internal/Administrasi (kesekretariatan), sedangkan 3 (tiga) sasaran merupakan sasaran yang bersifat pelayanan eksternal yaitu:

1. Pelayanan untuk pembangunan (Peningkatan fasilitas sarana Perhubungan)
2. Pelayanan untuk masyarakat (Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan umum)

Sasaran 1. Tersedianya Infrastruktur /Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal Untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Tersedianya infrastruktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Darat	593.456 Orang	45.367 Orang	7,64
		2. Jumlah Arus penumpang angkutan umum sungai dan danau	323.280 Orang	27.187 Orang	8,41
		3. Jumlah Armada Kapal Angkutan Umum sungai dan danau	199 Kapal	188 Kapal	94,47
		4. Jumlah Angkutan Umum Darat	370 Unit	23 Unit	6,22
		5. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	3 Unit 2 Unit 5 Unit	2 Unit 1 Unit 3 Unit	66,67 100 60

Sasaran “Tersedianya Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang ” diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang mencakup darat, sungai, udara dalam rangka mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Berkualitas, Tepat Guna, Dapat Melayani Seluruh Wilayah dan Mencukupi Kebutuhan Masyarakat.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan sasaran melalui dukungan dana APBD Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 1.768.029.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 1.749.353.100 atau 98,94% dari pagu anggarannya. Berikut Program dan kegiatan yang mendukung sasaran “Tersedianya Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategi	Program	Anggaran				Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%		
1.	Tersedianya infrastruktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Program Penataa Desa	Rp. 629.964.000,00	Rp. 629.964.000,00	Rp. 622.590.600,00	98,83	100	1,17
		2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 230.000.000,00	Rp. 185.540.000,00	Rp. 184.313.300,00	99,34	100	0,66
		3. Program Pengelolaan pelayaran	Rp. 1.055.735.000,00	Rp. 942.525.000,00	Rp. 940.509.200,00	99,79	100	0,21
Jumlah			Rp. 1.915.699.000,00	Rp. 1.758.029.000,00	Rp. 1.747.413.100,00	99,40	100	0,06

Dari Tabel 3.1 diatas untuk sasaran **“Tersedianya Infrastruktur /Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal Untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang”** ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,06% dari pagu setelah perubahan , tapi jika dibandingkan dengan pagu anggaran sebelum perubahan ada efisiensi anggaran sebesar 8,97 % dikarenakan pada Tahun Anggaran 2021 dari pagu murni banyak mengalami pengurangan/pemotongan pagu anggaran sebagai akibat dari devisit anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka menangani Pandemi Covid-19. Anggaran yang dipotong tersebut yaitu kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) .

Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut analisis pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, guna mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam mendukung sasaran **“Tersedianya Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang ”** . Analisa untuk masing-masing program/kegiatan :

1. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penatan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 629.964.000,- terealisasi sebesar Rp. 622.590.600 atau 98,83% *output* nya adalah berupa Pengadaan sarana transportasi air perairan dibawah 20 GT (motor Klotok) sebanyak 3 Unit diperuntukkan 1 Unit di desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir, 1 Unit Di Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai da 1 unit lagi di Desa Temakung Kecamatan Serawai.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C pada Sub Kegiatan Pembangunan Gedung terminal dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 174.000.000 terealisasi sebesar Rp. 173.348.300 atau 99,63% *output* nya adalah Pembangunan 2 Unit Halte yaitu pembangunan 1 unit Halte SDN 27 Gernis Kecamatan Sepauk dan 1 Unit Pembangunan halte SDN 2 Lengkenat Kecamatan Sepauk.

- Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi , audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.540.000 terealisasi sebesar Rp. 6.060.000 atau 92,66% *output* nya adalah Terlaksananya Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan khususnya perusahaan angkutan umum.
- Kegiatan Penyediaan angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi sebesar Rp. 4.905.000 atau 98,10 % *output* nya adalah Ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.

1. Program Pengelolaan Pelayaran

- Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.895.000 terealisasi sebesar Rp. 1.895.000 atau 100% *output* nya Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau.
- Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota pada sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota dalam daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000 terealisasi sebesar Rp. 1.500.000 atau 100% *output* nya adalah terlaksananya pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal.

- Kegiatan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 939.130.000 terealisasi sebesar Rp. 937.114.200 atau 99,79% *output* nya Pembangunan tambatan perahu sebanyak 10 paket yaitu masing-masing 1 paket di : Desa Beluh Mulyo Kec. Ketungau Hilir, di Desa Embeluh Kec. Ketungau Hulu, di Desa Jentawang Hilir Kec. Ketungau Hilir, di Desa Kayu Dujung Kec. Ketungau Tengah, di Desa Melingkat Kec. Kayan Hilir, di Desa Nanga Sejirak Kec. Ketungau Hilir, di Desa Sebadak Kec. Ketungau Hulu, di Desa Lalang Inggar Kec. Kayan Hilir , di Desa Pakak Kec. Kayan Hilir dan di Jl. Dara Juanti Rt.01/Rw 01 KKKU Kec. Sintang dan rehab stegher sebanyak 2 Paket yaitu Rehab Berat stegher dusun Kemangai 2 Desa Lunjang Tingang Kec. Ambalau .

Tingkat keberhasilan dalam menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indicator sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan umum Darat

Pada Tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Sintang jumlah arus penumpang angkutan umum darat yang keluar masuk terdata sebanyak 45.367 Orang, data tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Data Penumpang Angkutan Umum Darat
di wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2020

NO.	TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH PENUMPANG	
			KELUAR	MASUK
1.	Angkutan Kota	412	894	862
2.	Angkutan Pedesaan	194	920	839
3.	Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	2.040	20.871	20.981
	Total	2.646	22.685	22.682

Upaya yang dilakukan dalam memperlancar arus lalu lintas serta keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan umum pada Tahun Anggaran 2021. Untuk Capaian Kinerja ini melalui dukungan kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang antar Kotadalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.905.000,- atau 98,10%.

Capaian indikator target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021, Untuk Target Penumpang Angkutan Umum Darat Tahun 2021 sebesar 593.456 penumpang, yang terealisasi sebesar 45.367 penumpang atau sebesar 7,64%.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Penumpang Angkutan Umum Darat
Tahun 2016 sampai dengan 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya infrastruktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Jumlah Arus penumpang angkutan umum darat	537.511	211.745	218.769	201.946	37.086	45.367

Berdasarkan tabel diatas, realisasi jumlah arus penumpang angkutan umum darat dibandingkan untuk tahun 2021 ada kenaikan sebesar 22,33% dari tahun sebelumnya yaitu ditahun 2020.

1.2 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Sungai dan danau.

Untuk kelancaran dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang , maka pada Tahun Anggaran 2021 ini untuk Capaian Kinerja output ini melalui dukungan Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.895.000 terealisasi sebesar Rp. 1.895.000 atau 100% . Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang di tahun 2021 telah mentarget kan untuk Arus Penumpang Angkutan Sungai sebagai berikut ini :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Penumpang Umum Angkutan Sungai dan Danau
Tahun 2021

NO.	JENIS KAPAL	TRAYEK	TARGET PENUMPANG	JUMLAH PENUMPANG
1.	Angkutan Pedesaan GT-7	Sintang – Sepauk	10.800	0
		Sintang - Tempunak	6.480	0
		Sintang – Tanjung Prada	4.320	0
		Sintang – Kelansam	12.960	756
		Sintang – Simba	6.480	0
		Sintang – Lebang	8.640	336
		Sintang – Nanga Ketungau	6.480	0
		Sintang – Jetak	10.800	0
		Sintang – Dedai	6.480	0
		Sintang - Gandis	6.480	0
		Jumlah	79.920	1.092
2.	Angkutan Pedesaan Speed Boat GT-1	Sintang – Senaning	7.200	0
		Sintang – Merakai	21.600	4.147
		Sintang – Nanga Ketungau	9.000	2.880
		Sintang – Lebang	7.200	2.700
		Sintang – Serawai	36.000	3.600
		Sintang - Ambalau	9.000	2.520
		Jumlah	90.000	15.847
		Jumlah Total	169.920	16.939

Dari tabel diatas jumlah penumpang umum angkutan sungai dan danau yang ditergetkan berdasarkan kapasitas angkutan kapal sebesar 169.920 orang , terealisasi sebesar 16.939 orang atau 9,97%

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Penumpang Umum Angkutan Penyeberangan
Tahun 2021

NO.	JENIS KAPAL	TRAYEK	TARGET PENUMPANG	JUMLAH PENUMPANG
1.	Sampan Tempel bermotor GT-1	Sungai Durian – Museum	38.400	3.360
		Sungai Durian – Ps. Inpres	19.200	1.680
		Ps. Inpres – Menyumbang	9.600	840
		Sepauk – Belitang	67.200	3.696
		Senangan Kecil - Wirayuda	38.400	672
		Jumlah	172.800	10.248

Dari tabel diatas jumlah penumpang umum angkutan Penyeberangan yang ditergetkan berdasarkan kapasitas angkutan kapal sebesar 172.800 orang , terealisasi sebesar 10.248 orang atau 5,931%. Untuk jumlah arus penumpang angkutan umum sungai dan danau secara keseluruhan ditargetkan sebesar 342.720 orang terealisasi sebesar 27.187 orang atau 7,93% , akan tetapi jika realisasi berberdasarkan target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 ditargetkan sebesar 323.280 orang terealisasi sebesar 27.187 orang atau 8,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Penumpang Umum Angkutan
Sungai dan Danau
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya infrastruktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Jumlah Arus penumpang angkutan umum sungai dan danau	26.820	23.532	20.946	18.798	19.872	27.187

Berdasarkan tabel diatas untuk jumlah arus penumpang angkutan umum sungai dan danau realisasinya menurun setiap tahunnya akan tetapi ditahun 2021 ada kenaikan jumlah penumpang sebanyak 7.315 orang dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 hal ini disebabkan karena telah tersedianya alat keselamatan penumpang dikapal dan penyeberangan terhadap kecelakaan dalam perlindungan asuransi jasa raharja, sehingga penumpang lebih bijak dalam memilih sarana dan prasarana transportasi.

1.3 Jumlah Armada Kapal Angkutan Umum sungai dan Danau

2. Armada Kapal Angkutan Umum Sungai merupakan Sarana Moda Transportasi Perairan sebagai sarana alat angkutan umum Orang dan Barang , kinerja output ini dicapai melalui kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100%. serta Kegiatan Penyelenggaraan Penatan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 629.964.000,- terealisasi sebesar Rp. 622.590.600 atau 98,83% *output* nya adalah berupa Pengadaan sarana transportasi air perairan dibawah 20 GT (motor Klotok) sebanyak 3 Unit diperuntukkan 1 Unit di desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir, 1 Unit Di Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai dan 1 unit lagi di Desa Temakung Kecamatan Serawai.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Jumlah Kapal Angkutan Umum Sungai
Danau dan Penyeberangan
Tahun 2016 -2021

No	Trayek	Target						Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Angkutan Pedesaan GT-7 Motor Klotok												
1.	Sintang - Sepauk	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
2.	Sintang - Tempunak	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
3.	Sintang - Tj.Perada	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
4.	Sintang - Kelansam	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	3
5.	Sintang - Simba	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
6.	Sintang - Lebang	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	2
7.	Sintang - Ng. Ketungau	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	1
8.	Sintang - Jetak	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
9.	Sintang - Dedai	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
10.	Sintang - Gandis	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
II.	Angkutan Pedesaan GT-1 Speed Boat												
1.	Sintang - Senaning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sintang - Merakai	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3.	Sintang - Ng.Ketungau	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.	Sintang - Lebang	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5.	Sintang - Serawai	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6.	Sintang - Ambalau	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

III.	Angkutan Penyeberangan GT-1 Sampan Tempel Bermotor												
1.	<i>Sungai Durian - Musium</i>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.	<i>Sungai Durian - Ps.Inpres</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.	<i>Ps.Inpres - Menyumbang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.	<i>Sepauk - Belitang</i>	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
5.	<i>Senangan Kecil - Wirayuda</i>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Dari tabel diatas,jumlah kapal angkutan umum yang ditargetkan beroperasi sebanyak 227 Kapal, yang beroperasi sebanyak 188 Kapal.

Tabel 3.8
Data Armada Kapal Angkutan Umum, Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang yang beroperasi Tahun 2021

NO.	JENIS ANGKUTAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Angkutan Pedesaan GT-7 Motor Klotok	6	Data Angkutan Perdesaan
2.	Angkutan Penyeberangan GT-1 Sampan Tempel Bermotor	90	Data Angkutan Penyeberangan yang beroperasi di 3 Kecamatan, yaitu : Kec. Sintang, Sepauk, dan Kec. Ketungau Tengah
3.	Angkutan Pedesaan GT-1 Speed Boat	92	Data Angkutan sungai yang beroperasi di 5 Kecamatan yaitu : Kec. Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kelam Permai, Serawai, dan Kec. Ambalau
	Jumlah	188	

Untuk Jumlah Armada Kapal Angkutan Umum Sungai dan Danau berdasarkan Tabel 3.3 diatas target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 ditargetkan sebesar 199 Kapal, yang beroperasi sebanyak 188 Kapal atau 94,47%, . Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Jumlah Armada Kapal Angkutan Umum
Sungai dan Danau
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya infrastruktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Jumlah Armada kapal angkutan umum sungai dan danau	256	252	256	254	185	188

Jika dilihat dari tabel diatas untuk jumlah armada kapal di Kabupaten Sintang jika dibandingkan dengan target Renstra, mengalami penurunan,, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020, ditahun 2021 ini ada penambahan 3 armada pada angkutan pedesaan hal ini disebabkan adanya permintaan dari pemilik kapal dan adanya usulan bantuan kapal GT-7 dari kepala Desa untuk menuhi kebutuhan angkutan penumpang dan barang.

1.4 Jumlah Angkutan Umum Darat

Angkutan Umum Darat merupakan sarana transportasi melalui darat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang bagi masyarakat yang menggunakan sarana transportasi dimaksud.

Berdasarkan target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 untuk tahun 2021 jumlah Angkutan Umum Darat ditargetkan sebanyak 370 Unit dan terelisasi sebanyak 32 Unit atau 8,70% . kinerja ini di dukung melalui kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.615.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.990.000 atau 92,75%

Tabel 3.10
Data Angkutan Umum Darat di Kabupaten Sintang
Berdasarkan Lintasan Trayek

NO.	JENIS ANGKUTAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Oplet	70 Unit	Angkutan dalam Kota
2.	Oplet	268 Unit	Angkutan Pedesaan
3.	Bis	0 Unit	Angkutan Pedesaan
4.	Bis	21 Unit	Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP)
5.	Taxi	15 Unit	Taxi Bandara (beroperasi Mulai 2019)
	Jumlah	374 Unit	

Tabel 3.11
Data Angkutan Umum Darat di Kabupaten Sintang
Yang aktif dan tidak aktif

NO.	JENIS ANGKUTAN	JUMLAH TOTAL ANGKUTAN	JUMLAH YANG AKTIF	JUMLAH YANG TIDAK AKTIF
1.	Angkutan Kota	70 Unit	0 Unit	70 Unit
2.	Angkutan Pedesaan	268 Unit	5 Unit	263 Unit
3.	AKDPBis	21 Unit	- Unit	21 Unit
4.	Taxi Bandara	15 Unit	5 Unit	10 Unit
	Jumlah	374 Unit	10 Unit	364 Unit

Bila dilihat dari tabel 3.10 dan Tabel 3.11 diatas, bahwa untuk jumlah angkutan umum darat untuk tahun 2021 berjumlah sebanyak 374 Unit dengan jenis angkutan umum berupa Bis, Oplet dan Taxi, dari jumlah 374 Unit tersebut yang masih aktif/beroperasi hanya 10 Unit dan 364 Unit sudah tidak beroperasi lagi .

Apabila dibandingkan Jumlah angkutan Umum Darat yang masih aktif/beroperasi beberapa tahun terakhir, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Angkutan Umum Darat
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya infrastruktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Jumlah Angkutan Umum Darat	44 Unit	30 Unit	29 Unit	22 Unit	32 Unit	10 Unit

Apabila dilihat dari data perbandingan jumlah Angkutan Umum setiap tahunnya bersifat fluktuatif.

1.5 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal bis

a. **Pelabuhan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Pelabuhan/dermaga sungai di Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) dermaga, dari sebelas dermaga tersebut, 2 (dua) diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Pelabuhan Sungai, yaitu : Pelabuhan Sungai Durian dan Pelabuhan Sungai Ringin. peningkatan dermaga Sungai Durian menjadi Pelabuhan Sungai, terlaksana pada Tahun 2019, dimana dalam peningkatan dermaga tersebut telah merubah dan merelokasi struktur bangunan lama. Adapun anggaran untuk pembangunan dan peningkatan dermaga Sungai Durian menjadi Pelabuhan Sungai bersumber dari dana APBN. Untuk pembangunan dermaga, tahun pembangunan dan anggaran yang di gunakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Data Dermaga di Wilayah kabupaten Sintang

NO.	URAIAN	LOKASI	TAHUN PEMBANGUNAN
1.	Dermaga Sungai Durian	Kel. Kapuas Kiri Hilir Kec. Sintang	1970
2.	Dermaga Sungai ringan	Kel. Kedabang Kec. Sintang	2004
3.	Dermaga Susilo	Kel. Kapuas Kiri Hulu Kec. Sintang	2010
4.	Dermaga Sungai Ana	Desa Sungai Ana Kec. Sintang	2017
5.	Dermaga Lunjang Tingang	Desa Lunjang Tingang Kec. Ambalau	2017
6.	Dermaga Mekar Sari	Desa Mekar Sari Kec. Serawai	2017
7.	Dermaga Senangan Kecil	Kec. Ketungau tengah	2017
8.	Dermaga Nanga Kemangai	Desa nanga Kemangai Kec. Ambalau	2018
9.	Dermaga Tanjung Ria	Desa Tanjung Ria Kec. Sepauk	2018
10.	Dermaga Wirayuda	Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah	2018
11.	Dermaga Tontang	Desa Tontang Kec. Serawai Kec Serawai	2018

Dari tabel diatas,terjadi penambahan pembangunan dermaga sungai secara bertahap,yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 4 (empat) dermaga dan pada Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) dermaga, adapun pembiayaan pembangunan dari dermaga-dermaga tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal.

Tabel 3.14
Peningkatan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai

NO	URAIAN	LOKASI	TAHUN
1.	Pelabuhan Sungai Durian	Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang	2019
2.	Dermaga Sungai Ringin	Kel. Kedabang, Kec. Sintang	2020

Dari tabel diatas, peningkatan dermaga Sungai Durian menjadi Pelabuhan Sungai terealisasi pada Tahun 2019, menggunakan anggaran APBN Tahun 2019.

b. Pelabuhan Udara adalah merupakan sebuah fasilitas yang diperuntukan bagi maskapai penerbangan seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Sintang terdapat 2 (dua) Pelabuhan udara yaitu Pelabuhan Udara Susilo dan Pelabuhan Udara Sungai Tebelian. Pelabuhan udara yang beroperasi saat ini hanya 1 (satu) Pelabuhan udara yaitu Pelabuhan Udara Sungai Tebelian .

c. Terminal Bus di Kabupaten Sintang sampai dengan 2021 yang masih beroperasi sebanyak 3 (tiga) Terminal yaitu Terminal Nanga Mau, Terminal Tanjung Puri, dan Terminal Sungai Durian, sedangkan untuk terminal bus Sungai Tebelian sudah dialihkan pengelolaannya dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Terminal di Kecamatan Sepauk untuk saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

Untuk kelancaran dan kenyamanan Angkutan Umum pada tahun anggaran 2021 didukung melalui Kegiatan :

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 174.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 173.348.300,0 atau 99,63%

1.8. Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut Tabel analisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU pada tahun 2021 berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2016-2021.

Tabel 3.15
Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	PENYEBAB	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Darat	Realisasi sebesar 7,64% dari target 593.456 terealisasi 45.367	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Dan prasarana yang belum memadai - Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi - Peralihan dari angkutan perorangan yang harus melalubadan Usaha - Banyaknya angkutan illegal baik angkutan umum barang maupun orang - Layanan jasa angkutan yang belum maksimal - Dampak Pandemi Covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan jasa pelayanan Angkutan Umum serta meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peralihan dari angkutan pribadi menjadi badan usaha
2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Sungai dan danau	Realisasi sebesar 8,41% dari target 323.280 terealisasi 27.187	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perpendekan jalur lintasan trayek - Angkutaan Umum Tidak beroperasi pada jaringan trayek yang telah ditetapkan - Masyarakat lebih banyak menggunakan moda transportasi darat - Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan karakter dari para motoris kapal angkutan sungai , danau dan penyeberangan terhadap keselamatan penumpang 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan dilapangan , terutama terhadap motoris kapal angkutan penumpang dalam mengoperasikan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
3.	Jumlah Armada Kapal Angkutan Umum sungai dan danau	Realisasi sebesar 94,47% dari target 199 terealisasi 188	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat lebih banyak menggunakan moda transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana transportasi

			<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat banyak yang menggunakan kendaraan pribadi- 	<p>sungai dan danau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Koordinasi antar bidang di internal Dishub Kab. Sintang dalam menanggapi usulan dari beberapa kepala DEsa kepada pemerintah pusat dan melakukan koordinasi melalui Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal.
4.	Jumlah Angkutan Umum Darat	Realisasi sebesar 6,22% dari target 370 terealisasi 23	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sudah banyak menggunakan kendaraan pribadi - Banyak kendaraan yang sudah tidak layak beroperasi - Karena Kondisi alam dan kerusakan jalan - Dampak dari pandemi covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan fasilitasi dan sarana angkutan umum yang layak untuk beroperasi sehingga menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang - Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan - Memberi subsidi pada angkutan umum
5.	Jumlah Pelabuhan laut/udara/Terminal Bis - Pelabuhan Sungai - Pelabuhan Udara - Terminal Bis	Terealisasi 2 dari target sebanyak 3 Terealisasi 1 dari target sebanyak 2 Terealisasi 3 dari target sebanyak 5	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada peningkatan Dermaga sungai menjadi pelabuhan sungai - Pelabuhan Udara yang beroperasi hanya satu yaitu Bandara Sungai Tebelian - Terminal Bis Sei Tebelian sudah dialihkan ke Propinsi, sedangkan untuk Terminal Kec. Sepauk sudah tidak beroperasi lagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pelabuhan Sungai, Pelabuhan Udara dan Terminal Bis yang saat ini masih beroperasi - Meningkatkan mutu pelayanan guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan demi keselamatan penumpang

Sasaran 2 Tersedianya Fasilitas Perlengkapan rambu-rambu lalu lintas

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan rambu-rambu lalu lintas	1. Rasio Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas angkutan jalan.	95	0	0

Sasaran “Tersedianya Fasilitas Perlengkapan rambu-rambu lalu lintas” diarahkan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas dengan meningkatkan Fasilitas perlengkapan jalan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan untuk mencapai misi Meningkatkan Tingkat Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan sasaran “Tersedianya Fasilitas Perlengkapan rambu-rambu lalu lintas” melalui dukungan dana APBD Tahun 2021 melalui kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Kota pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan yang semula anggaran sebesar Rp. 30.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 dikarenakan anggaran tersebut telah di refocusing .

Tabel 3.16
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategi	Program	Anggaran				Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%		
1.	Tersedianya perlengkapan rambu-rambu lalu lintas	Fasilitas rambu-rambu lalu lintas	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 30.000.000	Rp. 0	Rp. 0	0	0

a. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Sub Kegiatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan yang semula muncul di anggaran murni APBD Tahun 2021 merupakan anggaran untuk pemeliharaan APILL APILL di 4 (empat) titik yaitu:

1. Simpang lima
2. Simpang Polres
3. Simpang Pertanian
4. Simpang Alambana

Dan juga untuk pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas terdapat di 19 (Sembilan belas) lokasi yaitu:

1. Jalan Kelam
2. Jalan PKP Mujahidin
3. Jalan Dara Juanti
4. Jalan Pangeran Kuning
5. Jalan M. Saad
6. Jalan Lintas Melawi
7. Jalan MT. Haryono
8. Jalan P. Diponegoro
9. Jalan Apang Semangai
10. Jalan Ks. Tubun
11. Jalan dr. Wahidin
12. Jalan Masuka 2
13. Jalan Imam Bonjol
14. Jalan Wr. Supratman
15. Jalan Hutan Lindung
16. Jalan Kesatria
17. Jalan A. Yani
18. Jalan Pahlawan
19. Jalan Alambana

2.1 Rasio Pemasangan Rambu-rambu

Ditahun 2021 Capaian kinerja output iuntuk rasio pemasangan rambu-rambu sebesar 0% Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah untuk rasio pemasangan rambu rambu lalu lintas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	40,02	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas jumlah rambu lalu lintas yang ditargetkan pada periode 2016-2021 sebanyak 1.999 rambu, yang sudah terealisasi sebanyak 800 rambu atau sebesar 40,02%.

2.2. Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Tabel 3.18
Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	PENYEBAB	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Rasio Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	Realisasi sebesar 0% dari target 95%	- Belum tersedia anggaran untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas.	- Mengusulkan Penganggaran untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas melalui APBD Provinsi dan APBN. - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, dan Balai Pengelola Transportasi Darat).

Sasaran 3 Terpenuhiya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Terpenuhiya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1. Jumlah izin trayek angkutan darat	75	72	96,00
		2. Jumlah izin trayek angkutan umum sungai dan danau yang beroperasi	20	36	180
		3. Jumlah Uji KIR angkutan Umum	104	5.418	5.210
		4. Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	43	4,89	11,37

Sasaran “Terpenuhiya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang” diarahkan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan bertransportasi. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Meningkatkan Tingkat Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan sasaran “Terpenuhiya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam kabupaten Sintang” melalui dukungan dana APBD Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 104.437.500,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 67.075.000,00 atau 64,23% dari pagu anggarannya, berikut Program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut :

Tabel 3.19
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategi	Program	Anggaran				Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%		
1.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 117.725.000	Rp. 93.367.500	Rp. 56.005.000	59,98	100	40,02
		2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 35.000.000	Rp. 11.070.000	Rp. 11.070.000	100	100	-
Jumlah			Rp. 152.725.000	Rp. 104.437.500	Rp. 67.075.000	64,23	100	35,77

Dari Tabel diatas untuk sasaran **“Terpenuhinya Standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang”** ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,27% dari pagu Anggaran setelah perubahan, tapi jika dibandingkan dengan pagu anggaran sebelum perubahan ada efisiensi anggaran sebesar 35,77 % dikarenakan pada Tahun Anggaran 2021 dari pagu murni banyak mengalami pengurangan/pemotongan pagu anggaran sama seperti sasaran 1 dan sasaran 2 diatas sebagai akibat dari devisa anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka menangani Pandemi Covid-19.

b. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut analisis pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja dalam mendukung sasaran **“Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang”**. Analisa untuk masing-masing program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)

- Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan Bermotor Kab/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.580.000 atau 85,80% *output* nya adalah melakukan Audit dan inspeksi serta pemeriksaan administrasi dan kelengkapan kendaraan darat sehingga tertib administrasi perijinan kendaraan.
- Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 83.367.500,- terealisasi sebesar Rp. 47.425.000,- atau 56,89 % *output* nya adalah jumlah izin KIR yang diterbitkan, serta kalibrasi mesin PKB dan alat uji yang terpelihara.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau Badan Usaha pada Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau Badan Usaha kewenangan Kab/Kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.570.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.570.000,- atau 100% *outputnya* adalah terlaksananya pelayanan perizinan kapal dan pelayanan kepada pengguna angkutan.
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau Badan Usaha kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.500.000,0 atau 100% *outputnya* adalah melakukan pengawasan terhadap ijin trayek angkutan sungai serta melakukan pembinaan kepada pengemudi maupun penumpang kapal tentang pentingnya menjaga keselamatan , serta ketentuan dan syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun penumpang kapal.

Tingkat keberhasilan dalam menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1.5 Jumlah izin trayek angkutan darat

1. Izin trayek merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi kendaraan umum untuk mengoperasikan kendaraannya dalam melakukan kegiatan mengangkut orang maupun barang yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Untuk capaian indikator kinerja ini melalui kegiatan Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan Bermotor Kab/Kota .

Berdasarkan target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 untuk izin trayek angkutan darat di tahun 2021 ditargetkan sebanyak 75 trayek dan terealisasi 72 trayek atau 96%.

Berikut data trayek angkutan Umum di Kabupaten Sintang .

Tabel 3.20
Data Trayek Angkutan Umum Dalam Kota

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Terminal Sungai Durian – Tanjung Puri	22	9	198
2.	Terminal Sungai Durian – Baning	10	9	90
3.	Terminal Sungai Durian – Sei Putih	4	9	36
4.	Terminal Tj. Puri – Sei Durian	4	9	36
5.	Terminal Tj. Puri – Baning	12	9	108
6.	Terminal Tj. Puri – Jerora	5	9	45
7.	Terminal Tj. Puri – KP. Ladang	4	9	36
8.	Terminal Tj. Puri – Menyurai	4	9	36
9.	Terminal Tj. Puri – Sesar	3	9	27
10.	Terminal Tj. Puri – Museum	1	9	9
11.	Terminal Tj. Puri – Sei Kawat	1	9	9
Jumlah		70	99	630

Tabel 3.21
Data Trayek Angkutan Antar Kota
Dalam Propinsi (AKDP)

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Sintang – Pontianak	4	40	160
	Prim 642 Kapuas			
2.	CV. Aryo	3	40	120
	Sintang – Putussibau			
3.	CV. Indah Utama	2	25	50
	Sintang – Nanga Pinoh			
4.	PT. Duta	4	16	64
	Sintang - Bongkong			
5.	CV. Indah Utama	2	16	32
	Sintang - Jongkong			
6.	CV. Asri	2	25	50
	Sintang – Suhaid			
CV. Indah Utama		4	16	64
Jumlah		21	178	540

Tabel 3.22
Data Trayek Angkutan Umum Pedesaan
Di Terminal Sungai Durian

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Terminal Sungai Durian – Sungai Ukoi	21	9	189
2.	Terminal Sungai Durian –Pandan	19	9	171
3.	Terminal Sungai Durian – Dedai	11	9	99
4.	Terminal Sungai Durian – SKPI	17	9	153
5.	Terminal Sungai Durian – Beloyang	4	9	36
6.	Terminal Sungai Durian – Baya Betung	1	9	9
7.	Terminal Sungai Durian – Gurung	2	9	18
8.	Terminal Sungai Durian – Bancoh	2	9	18
9.	Terminal Sungai Durian – Laman Bukit	3	9	27
10.	Terminal Sungai Durian – Kajang	2	9	18
11.	Terminal Sungai Durian – Gurung Mali	2	9	18
12.	Terminal Sungai Durian – Sei Kura	7	9	63
13.	Terminal Sungai Durian – Tempunak	9	9	81
14.	Terminal Sungai Durian – SKPC/Paoh	13	9	117
15.	Terminal Sungai Durian – Sepauk	12	9	108
16.	Terminal Sungai Durian – SKPH	8	9	72
17.	Terminal Sungai Durian – Sei Ayak	2	9	18
18.	Terminal Sungai Durian – Mansik	4	9	36
19.	Terminal Sungai Durian – Mensiku	5	9	45
20.	Terminal Sungai Durian – Telaga	8	9	72
21.	Terminal Sungai Durian – Kelansam	7	9	63
22.	Terminal Sungai Durian – Baung	5	9	45
23.	Terminal Sungai Durian – Sejirak	1	9	9
24.	Terminal Sungai Durian – Tumbuk	1	9	9
25.	Terminal Sungai Durian –Pedadang	2	9	18
26.	Terminal Sungai Durian –Semubuk	1	9	9
27.	Terminal Sungai Durian – Serangas	3	9	27
28.	Terminal Sungai Durian – Segantong	1	9	9
29.	Terminal Sungai Durian – Mangkok Matai	1	9	9
30.	Terminal Sungai Durian – Balai Sepuak	1	9	9
31.	Terminal Sungai Durian –Gandis hilir	1	9	9
32.	Terminal Sungai Durian – Kederas	1	9	9

Tabel 3.23
Data Trayek Angkutan Umum Pedesaan
Di Terminal Tanjung Puri

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Terminal Tanjung Puri – Sei Ukoi	4	9	36
2.	Terminal Tanjung Puri – L. Kelam	7	9	63
3.	Terminal Tanjung Puri – Empaci	5	9	45
4.	Terminal Tanjung Puri – SKP.G 123	6	9	54
5.	Terminal Tanjung Puri – SKP 456	3	9	27
6.	Terminal Tanjung Puri – Jetak	7	9	63
7.	Terminal Tanjung Puri – Pengkadan	3	9	27
8.	Terminal Tanjung Puri – Dedai	4	9	36
9.	Terminal Tanjung Puri – BLH. Merindu	6	9	54
10.	Terminal Tanjung Puri – Baras Umin	6	9	54
11.	Terminal Tanjung Puri – Gandis	3	9	27
12.	Terminal Tanjung Puri – SP.7.8Bengkuang	3	9	27
13.	Terminal Tanjung Puri – Na. Tikan	5	9	45
14.	Terminal Tanjung Puri – Melingkat	3	9	27
15.	Terminal Tanjung Puri – Linggam Ipoh	1	9	9
16.	Terminal Tanjung Puri – Tugug	1	9	9
17.	Terminal Tanjung Puri – Na. Mau	6	15	96
18.	Terminal Tanjung Puri – Na. Tebidah	5	25	125
19.	Terminal Tanjung Puri – SP. Silat	4	9	36

Tabel 3.24
Data Trayek Angkutan Umum Jalur Kabupaten
Sintang –Kecamatan

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Sintang - Serawai	5	25	125
2.	Sintang – Na. Ketungau	0	25	0
3.	Sintang – Merakai	3	25	75
4.	Sintang - Senaning	1	25	25

Berikut perbandingan data realisasi Trayek Angkutan Umum 5 (lima) Tahun Terakhir berdasarkan Target Renstra dan RPJMD 2016-2021

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Jumlah izin trayek angkutan darat
Tahun 2016 sampai dengan 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah izin trayek angkutan darat	Taryek	72	72	72	72	72	72

Jika dilihat dari data perbandingan diatas, untuk Trayek angkutan Umum darat pada tahun 2021 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada penambahan untuk izin trayek .

1.6 Jumlah izin trayek angkutan Umum Sungai dan danau yang beroperasi

Untuk capaian kinerja jumlah izin trayek angkutan umum sungai dan danau di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 didukung melalui kegiatan Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau Badan Usaha pada Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan persyaratan Perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau Badan Usaha kewenangan Kab/Kota dalam system pelayanan erizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota.

Berikut data-data terkait izin trayek angkutan umum sungai dan danau.

Tabel 3.26
Data Jaringan Trayek angkutan umum sungai, danau dan penyeberangan

NO.	JENIS ANGKUTAN	JARINGAN TRAYEK	KETERANGAN
1.	Angkutan Pedesaan GT-7	Sintang – Sepauk (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Tempunak (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Tanjung Prada (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Kelansam (PP)	Aktif
		Sintang – Simba (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Lebang (PP)	Aktif
		Sintang – Nanga Ketungau (PP)	Aktif
		Sintang - Jetak (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Dedai (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Gandis (PP)	Tidak Aktif
2.	Angkutan Pedesaan Speed Boat	Sintang – Senaning (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Merakai (PP)	Tidak Aktif
		Sintang – Nanga Ketungau (PP)	Aktif
		Sintang – Lebang (PP)	Aktif
		Sintang – Serawai (PP)	Aktif
		Sintang – Ambalau (PP)	Aktif
3.	Angkutan Penyeberangan GT-1	Sungai Durian – Musium (PP)	Tidak Aktif
		Sungai Durian – Pasar Inpres (PP)	Tidak Aktif
		Pasar Inpres – Menyumbang (PP)	Tidak Aktif
		Sepauk – Belitang (PP)	Aktif

Tabel 3.27
Data Trayek Angkutan Umum Sungai dan Danau yang Beroperasi dan memiliki izin trayek di Tahun 2021

NO.	TRAYEK/LINTASAN	YANG BEROPERASI	YANG MEMILIKI IZIN
1.	Angkutan Pedesaan GT-7		
	- Sintang – Sepauk (PP)	5	-
	- Sintang – Tempunak (PP)	3	-
	- Sintang – Tanjung Prada (PP)	2	-
	- Sintang – Kelansam (PP)	6	3
	- Sintang – Simba (PP)	3	-
	- Sintang – Lebang (PP)	4	2
	- Sintang – Nanga Ketungau (PP)	3	1
	- Sintang - Jetak (PP)	5	-
	- Sintang – Dedai (PP)	3	-
- Sintang – Gandis (PP)	3	-	
2.	Angkutan Pedesaan Speed Boat		
	- Sintang – Senaning (PP)	8	-
	- Sintang – Merakai (PP)	24	-
	- Sintang – Nanga Ketungau (PP)	10	4
	- Sintang – Lebang (PP)	8	5
	- Sintang – Serawai (PP)	40	8
- Sintang – Ambalau (PP)	10	2	
3.	Angkutan Penyeberangan GT-1		
	- Sungai Durian – Musium (PP)	20	-
	- Sungai Durian – Pasar Inpres (PP)	10	-
	- Pasar Inpres – Menyumbang (PP)	5	-
	- Sepauk – Belitang (PP)	35	11
	Jumlah	207	36

Untuk capaian indikator kinerja Jumlah izin trayek angkutan Umum Sungai dan danau yang Sintang Tahun 2021 berdasarkan target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 ditargetkan sebanyak 20 terealisasi sebanyak 36 Izin Trayek atau 180%,

Berikut Tabel Jumlah izin trayek angkutan sungai dan danau untuk tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Jumlah izin trayek angkutan Umum
Sungai dan danau
Tahun 2016 sampai dengan 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah izin trayek angkutan Sungai dan danau	Taryek	27	27	27	27	27	36

Jika dilihat dari data perbandingan diatas, untuk Trayek angkutan Umum sungai dan danau pada tahun 2021 ada penambahan untuk jumlah izin trayek sebanyak 9 izin trayek dikarenakan kesadaran pemilik kapal/motoris kapal angkutan sungai dan danau terhadap keselamatan dan keamanan jiwa penumpang.

3.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

KIR adalah serangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Uji KIR wajib bagi kendaraan niaga, baik itu digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Melakukan uji KIR adalah wajib hukumnya bagi beberapa jenis kendaraan bermotor antara lain : *Dump Truck, Truck Tangki, Double Cabin, Pick Up, Bus, Taksi, Angkutan Kota, Travel* (khusus yang bertrayek) dan Kendaraan Khusus (dengan tambahan kereta gandeng atau tempel).

Untuk capaian kinerja jumlah Uji KIR Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tahun 2021 didukung melalui kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan bermotor. Di tahun 2021 untuk Jumlah angkutan umum yang wajib uji adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji
Tahun 2021

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Mobil Penumpang	235	
2.	Mobil Bus	140	
3.	Mobil Barang	5036	
4.	Kendaraan khusus	-	
5.	Kereta Gandengan	-	
6.	Kereta Tempelan	-	
	Total	5418	

Untuk capaian indikator kinerja Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2021 berdasarkan target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 ditargetkan sebanyak 104 Unit terealisasi sebanyak 5.418 Unit atau 5.210%,

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk jumlah angkutan umum yang wajib uji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Tahun 2016 sampai dengan 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	356	359	374	375	378	5.418

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk jumlah Uji KIR angkutan Umum yang wajib uji setiap tahunnya mengalami peningkatan.

3.4 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Untuk capaian indikator persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum diuji di seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Untuk tahun 2021 untuk angkutan umum yang telah lulus uji adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Jumlah Angkutan Yang Lulus Uji selama Periode
Tahun 2016 s/d 2021

NO.	JENIS KENDARAAN	YANG LULUS UJI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mobil Penumpang	77	22	23	28	6	4
2.	Mobil Bus	6	5	6	5	4	5
3.	Mobil Barang	2184	1206	1409	1832	159	256
4.	Kendaraan khusus						
5.	Kereta Gandengan						
6.	Kereta Tempelan						
	Total	2267	1233	1438	1865	169	265

Untuk capaian indikator kinerja Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2021 berdasarkan target Renstra dan RPJMD periode 2016-2021 untuk kepemilikan KIR angkutan ditargetkan sebesar 43% terealisasi hanya sebesar 4,89% dari jumlah Angkutan Umum yang wajib uji sebanyak 5.418 Unit yang lulus uji hanya sebanyak 265 Unit.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk jumlah angkutan umum yang lulus uji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Tahun 2016 sampai dengan 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	%	23,31	7,52	7,75	8,8	2,38	4,89

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk jumlah angkutan umum yang lulus uji setiap tahunnya mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan .

3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Tabel 3.32 Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1.	Jumlah izin trayek angkutan darat	Terealisasi sebesar 96,00% dari target sebanyak 75 trayek terealisasi sebanyak 72 trayek	- Kurangnya peminat untuk masuk kedalam trayek yang telah dibuka, sebagai akibat dari kurangnya penumpang baik orang maupun barang serta kondisi jalan yang rusak.	- Perbaiki sarana dan prasarana penunjang transportasi darat.
2.	Jumlah izin trayek angkutan umum sungai dan danau yang beroperasi	Terealisasi sebesar 180% dari target sebanyak 20 Trayek terealisasi sebanyak 36 Trayek	- Karena adanya pengurusan izin trayek oleh pemilik kapal ASDP dalam satu lintasan trayek - Tingginya Tingkat Kesadaran Pemilik Kapal /Motoris terhadap keselamatan Jiwa Penumpang	- Adanya sosialisasi tentang keselamatan jiwa penumpang yang menggunakan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan - Adanya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen kapal ASDP
3.	Jumlah Uji KIR angkutan umum	Terealisasi sebesar 5.210% dari target sebanyak 104 Unit terealisasi sebanyak 5.418 Unit	- Adanya Pertumbuhan Kendaraan Wajib Uji setiap Tahunnya - Adanya Kendaraan yang menumpang uji dari KabupatenKapuas hulu dan kabupaten Melawi - Adanya Kendaraan yang sudah tidak layak uji tetapi masih terdaftar dalam KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji)	- Pengadaan sarana pengujian kendaraan bermotor (perangkat elektronik dan material PKB) - Ketersediaan jaringan internet - Ketersediaan Kalibrasi peralatan Uji
4.	Persentase Kepemilikan angkutan Umum KIR	Terealisasi sebesar 4,89% dari target sebesar 43%	- Ada kendaraan yang sudah tidak layak operasi yang disebabkan oleh Faktor usia dari Kendaraan Tersebut - Kelengkapan Administrasi tidak sesuai prosedur	- Melakukan sosialisasi melalui spanduk digedung uji baik secara persyaratan teknis maupun administrasi.

			<ul style="list-style-type: none"> - Untuk angkutan umum sudah banyak yang tidak beroperasi lagi baik angkutan dalam kota maupun pedesaan dikarenakan sudah banyak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi serta kalah bersaingnya angkutan umum konvensional dengan armada online - Banyaknya kendaraan yang tidak dapat dilayani proses pengurusan pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan UPKB Kab. Sintang karena belum tersedianya fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar dari Kementerian Perhubungan RI sehingga proses pengujian kendaraan bermotor dialihkan ke kab/Kota terdekat yang sudah memenuhi fasilitas sesuai standar - Tidak Tersedianya anggaran pengujian kendaraan bermotor di tahun 2021 (berupa biaya pengadaan alat uji, mekanis, Pengadaan perangkat Perangkat SIM PKB, Pengadaan Kartu Uji Elektronik, Pemeliharaan dan Perbaikan baik alat uji maupun gedung Uji) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran untuk biaya operasional pengujian Kendaraan Bermotor agar pelayanan berjalan dengan lancar
--	--	--	--	---

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2021 ditargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 593.855.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 256.732.000,00 atau 43,23%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasai (Rp)	%
	PENDAPATAN	593.855.100,00	256.732.000,00	43,23
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	593.855.100,00	256.732.000,00	43,23
	RETRIBUSI DAERAH	593.855.100,00	256.732.000,00	43,23
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	143.640.000,00	100.910.000,00	70,25
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	162.122.000,00	33.771.000,00	20,83
3.	Retribusi Terminal	88.200.000,00	31.843.000,00	36,10
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	81.000.000,00	42.590.000,00	52,58
5.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	115.743.100,00	47.618.000,00	41,14
6.	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.150.000,00	0	0,00

2. Belanja

Pada tahun anggaran 2021 setelah APBD Perubahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mendapat alokasi dana Rp. 7.090.568.585 dan realisasi sebesar Rp. 6.507.074.991 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.253.873.948	Rp. 3.882.032.481	91,26
2.	Belanja Kegiatan	Rp. 2.836.694.637	Rp. 2.625.042.510	92,54
	Jumlah	Rp. 7.090.568.585	Rp. 6.507.074.991	91,77

Tabel3.33
Realisasi Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2021
sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Tersedianya infra struktur /sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum darat	1. Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.905.000,-	98,10
	2. Jumlah arus penumpang angkutan sungai	1. koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam satu daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	Rp. 15.735.000,-	Rp. 1.895.000,-	Rp. 1.895.000,-	100
	3. Jumlah Armada Kapal Angkutan Umum sungai dan danau	1. Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kab/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kab/Kota dalam daerah Kab/Kota	Rp. 20.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	100
	4. Jumlah Angkutan Umum Darat	2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Rp. 629.964.000,-	Rp. 629.964.000	Rp. 622.590.600,-	98,83
	5. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	1. Pelaksanaan inspeksi , audit dan pemenuhan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Rp. 10.000.000,-	Rp. 6.540.000,-	Rp. 6.060.000,-	92,66
	- Pelabuhan Sungai	1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp. 1.020.000.000,-	Rp. 939.130.000,-	Rp. 937.114.200,-	92,07
	- Pelabuhan Udara	1. 2. Pembangunan Gedung Terminal	Rp. 200.000.000,-	Rp. 174.000.000,-	Rp. 173.348.300,-	99,63
	- Terminal Bis					
Tersedianya fasilitas lalu lintas	1. Rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1. Jumlah izin trayek angkutan darat	1. Pelaksanaan inspeksi , audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kab/Kota	Rp. 30.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.580.000,-	85,8
	2. Jumlah izin trayek angkutan umum sungai, dan danau yang beroperasi	1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau Badan Usaha kewenangan Kab/Kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp. 15.860.000	Rp. 5.570.000,-	Rp. 5.570.000,-	100
		2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	Rp. 19.140.000,-	Rp. 5.500.000,-	Rp. 5.500.000,-	100
	3. Jumlah Uji KIR angkutan Umum	1. Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Rp. 87.725.000,-	Rp. 83.367.500,-	Rp.46.425.000	55,69
4. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum						

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2021 secara umum capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Sintang dikategorikan berhasil, namun secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih menemui beberapa kendala yaitu kondisi geografis daerah yang cukup berat mengakibatkan upaya menyediakan transportasi publik yang dapat memadai dan menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat masih belum dapat maksimal dilakukan. Akses jalan belum dapat mencapai hingga ke seluruh kecamatan dan desa serta tidak terpeliharanya jalan menyebabkan angkutan sungai masih menjadi primadona masyarakat dalam bertransportasi. Keterbatasan dana menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kualitas transportasi baik dari segi moda, sarana dan prasarana pendukung.

Data dan informasi mengenai perkembangan sistem transportasi di darat maupun di sungai masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tingkat kesadaran masyarakat akan ketertiban dalam berlalu lintas dan mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas masih sangat kurang dan meningkatkan jumlah kecelakaan karena mereka belum menyadari arti pentingnya dan dampak buruk apabila tidak taat dan patuh ketika berada di jalan raya.

Personil yang dimiliki Dinas Perhubungan saat ini masih sangat kurang sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan tupoksi Dinas Perhubungan yang cukup spesifik sehingga memerlukan tenaga teknis yang khusus pula yang profesional dan handal serta memahami tugasnya untuk dapat memberi pelayanan publik yang prima.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan maka Dinas Perhubungan telah mengambil langkah sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan bagi personil Dinas Perhubungan untuk selalu mengembangkan diri melalui berbagai diklat/pelatihan teknis maupun non teknis untuk meningkatkan kemampuan sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengajukan penambahan dana untuk operasional maupun dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan.
- c. Secara intensif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pengguna dan pemilik angkutan untuk dapat lebih memahami aturan lalu lintas.
- d. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan sehingga dapat bermanfaat bagi kegiatan pembangunan serta pelaporan.

Sintang **Maret 2022**
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG
DINAS
PERHUBUNGAN
FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641125 198803 1 004

LAKIP